

**KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM
PEMBERIAN RESEP DAN OBAT-OBATAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI
PUSKESMAS
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh :
Lira Wiet Jayanti
19.C2.0038

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**


TESIS
KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM
PEMBERIAN RESEP DAN OBAT-OBATAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI
PUSKESMAS
DI KABUPATEN DEMAK

diajukan oleh :
Lira Wiet Jayanti
19.C2.0038

telah disetujui oleh :

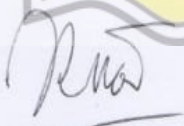


pembimbing I


Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, MH

tanggal 10-4-2020

Pembimbing II


drg. Irma HY Siregar, MH.Kes

tanggal 13-4-2020

PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : LIRA WIET JAYANTI

Nim : 19.C2.0038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Jumat, 24 April 2020

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH

2. drg. Irma Naida Yuliana Sirogar, MH.Kes

3. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH

(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Jumat, 24 April 2020



(Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ijinNya, penulisan tesis dengan judul **“Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak”** ini dapat diselesaikan.

Dari hasil penelitian terdapat ketentuan yang berbeda di dalam pengaturan mengenai pemberian resep dan obat oleh terapis gigi dan mulut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat atas mandat dari dokter gigi sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberian resep hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam pelaksanaannya di puskesmas yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa semua terapis gigi dan mulut yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pemberian resep dan obat. Resep dan obat yang diberikan adalah semua jenis obat dari golongan antibiotik, analgetik dan antiinflamasi. Sehingga hal ini tidak memenuhi perlindungan hukum bagi pasien.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS., IEC., selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH.CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan dosen

pembimbing utama yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan motivasi.

4. Ibu drg. Irma Haidar Siregar, MH.Kes selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan motivasi yang tak terhingga bagi penulis hingga tesis ini dapat selesai. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran dan motivasinya selama ini.
5. Para staff pengajar Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata yang telah memberikan materi kuliah yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya tesis ini.
6. Puskesmas di Kabupaten Demak yang telah bersedia menjadi lahan penelitian bagi peneliti dengan memberikan sumber data primer maupun sumber data sekunder mengenai Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak.
7. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata khususnya angkatan 23 yang telah bersedia saling berbagi suka dan duka, pengalaman ilmu pengetahuan serta memberikan dorongan, semangat serta kerjasama yang baik selama menempuh pendidikan di UNIKA.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Hukum Kesehatan ini.

Serta para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam tesis ini. Penulis harapkan tesis ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Kesehatan.

Semarang, April 2020

Penulis

Lira Wiet Jayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
1. Kerangka Konsep	11
2. Kerangka Teori.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	21
G. PENYAJIAN TESIS	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. PELAYANAN KESEHATAN	33
1. Definisi Pelayanan Kesehatan.....	33
2. Bentuk Pelayanan Kesehatan.....	35
3. Pelayanan Kesehatan Paripurna	36
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	37
B. TERAPIS GIGI DAN MULUT	39
1. Pengertian Terapis Gigi dan Mulut.....	39
2. Kewajiban dan Hak Terapis Gigi dan Mulut	40
3. Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut.....	45
C. TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PEMBERIAN RESEP DAN OBAT	46
D. TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS.....	49
1. Puskesmas	49
2. Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas	51
3. Fungsi Puskesmas.....	52
4. Visi dan Misi Puskesmas	53
5. Kewenangan Puskesmas	54
6. Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Dokter Gigi	56
7. Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Terapis Gigi.....	57
8. Teori Pengawasan.....	59
E. KEWENANGAN	61
F. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70

A. HASIL PENELITIAN.....	70
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	70



2.	Data Fasilitas Layanan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Demak.....	71
3.	Data Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.....	71
4.	Hasil Wawancara dengan Narasumber (Kepala Puskesmas).....	74
5.	Hasil Wawancara dengan Narasumber (Dokter Umum).....	78
6.	Hasil Wawancara dengan Narasumber (Dokter Gigi).....	80
7.	Hasil Wawancara dengan Responden (Terapis Gigi dan Mulut).....	83
B.	PEMBAHASAN	87
1.	Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi	87
a.	Dasar Hukum tentang Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan.....	87
b.	Bentuk Pengaturan tentang Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan.....	93
c.	Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan.....	98
2.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Memberikan Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak.....	102
a.	Kualifikasi Terapis Gigi dan Mulut yang Berpraktik.....	102
b.	Mekanisme Asuhan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.....	103
c.	Pengawasan (Monev).....	104
d.	Bentuk Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Terapis Gigi dan Mulut.....	106
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Melakukan Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak.....	108
	BAB IV PENUTUP.....	111
A.	KESIMPULAN.....	111
1.	Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi	111
2.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Memberikan Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak.....	114
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Melakukan Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak.....	115
B.	SARAN.....	116

DAFTAR PUSTAKA118
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Tabel data fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Demak..	71
Table 3.1 Tabel data tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Demak.....	72
Table 3.2 Tabel data tenaga kesehatan di lingkungan objek penelitian	73
Table 3.3 Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas pada Objek Penelitian...	74
Table 3.4 Hasil Wawancara dengan Dokter Umum pada Objek Penelitian.....	78
Table 3.5 Hasil Wawancara dengan dokter gigi pada Objek Penelitian.....	80
Table 3.6 Hasil Wawancara dengan Terapis Gigi dan Mulut pada Objek Penelitian.....	83



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR/ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :

“ KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PEMBERIAN
RESEP DAN OBAT - OBATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PELAYANAN KESEHATAN GIGI A PUSKESMAS DI KABUPATEN
DEMAK ”

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam
daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau
seluruhnya merupakan *hasil plagiat* maka saya rela untuk dibatalkan dengan
segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik
Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 15 Mei 2020



MASTERA
SEMIPAL
M. BACHRIF STEFANUS
6000
KONDISI BUKU
LIPA WIET JAYANTI
NIM. 19.C2.0030

*) : hilangkan yang tidak sesuai

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

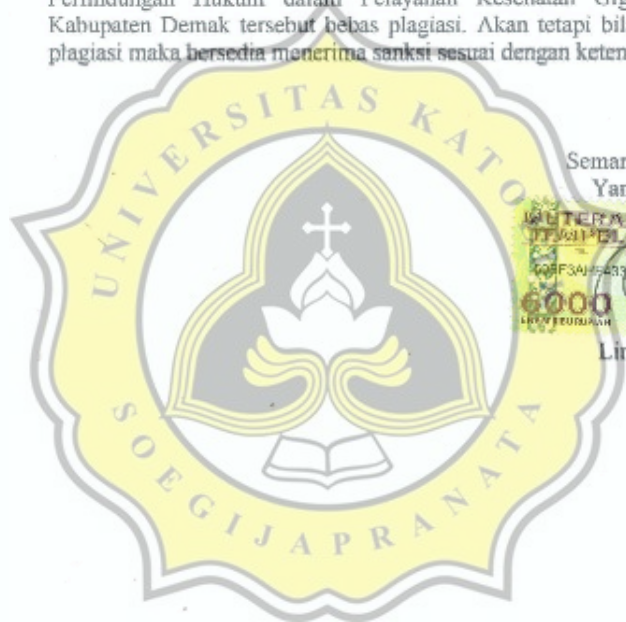
Nama : Lira Wiet Jayanti

NIM : 19.C2.0038

Progdi /Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/ Konsentrasi Hukum Kesehatan

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 14 Mei 2020

Yang menyatakan,



Lira Wiet Jayanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lira Wiet Jayanti
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 Mei 2020
Yang menyatakan,



Lira Wiet Jayanti

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Wujud pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah salah satunya puskesmas. Pengaturan tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, yang salah satu pasalnya menyebutkan tentang kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat atas mandat dari dokter gigi.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian terdapat ketentuan yang berbeda di dalam pengaturan mengenai pemberian resep dan obat oleh terapis gigi dan mulut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat atas mandat dari dokter gigi sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberian resep hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam pelaksanaannya di puskesmas yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa semua terapis gigi dan mulut yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pemberian resep dan obat. Sehingga hal ini tidak memenuhi perlindungan hukum bagi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan, faktor sosiologis terkait perilaku pasien dan tenaga medis dan faktor teknis terkait dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia di puskesmas.

Kata kunci: terapis gigi dan mulut, pemberian resep dan obat, kewenangan terapis gigi dan mulut

ABSTRACT

Health services are one of the aspect of national development which is developed through health efforts. The form of health services is carried out through three main components, which are health efforts, health workers, and health facilities. Dental and mouth therapists are one of the health workers who work in government health service facilities, such as a public health center. Regulations on the licensing and operation of dental and oral therapist practices are listed in Minister of Health Regulation No. 20 of 2016, which mentions the authority of dental and oral therapists in prescribing and medication from the mandate of dentist.

This research was a Sociological Juridical study with descriptive-analytical research specifications. This study used primary and secondary data carried out with field studies and literature studies. The data analyzed with qualitative data analysis method.

The result showed different provisions in the regulation regarding prescription and medication by dental and oral therapists. According to Regulation of the Minister of Health No. 20 of 2016, dental and mouth therapists can provide prescribing and medication on the mandate of the dentist while in the Minister of Health Regulation No. 73 of 2016 states that the prescription can only be done by a doctor or dentist. In its implementation at public health center which was the object of research, it was known that all dental and mouth therapists who were respondents in this study administered prescribing and medication. So, this does not fulfill the legal protection for patients. Factors that influence this are juridical factors related to conflicting regulations, sociological factors related to the behavior of patients and medical personnel and technical factors related to the lack of human resources at the public health center.

Keywords: *dental and mouth therapists, prescribing and medication, authority of dental and mouth therapists*